

Optimalisasi Sistem Pengeluaran Kas Pada Dinas X Di Kabupaten Bojonegoro: Studi Kasus Hasil Pembelajaran Lapangan

Ama Febriyanti^{1*}, Sheila Febriani Putri²
^{1,2}Universitas Negeri Malang

ama.febriyanti.1904226@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan guna mengkaji fenomena pengeluaran kas melalui kegiatan pembelajaran lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder berupa hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dinas X Kabupaten Bojonegoro. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro telah memiliki sistem dan prosedur yang jelas dengan dokumen dan buku atau catatan pendukung yang memadai, meskipun terdapat kendala tidak adanya sistem pengendalian internal.

Kata Kunci: Kas, Pengeluaran Kas, Sistem Akuntansi.

Abstract

This research was conducted to examine the phenomenon of cash expenditure through field learning activities. The approach used is a qualitative approach using two types of data, namely primary and secondary data in the form of interviews and direct observations in the field as well as related documents collected with observation techniques, interviews, and documentation. The research was conducted at Dinas X of Bojonegoro Regency. The data that has been collected is then analyzed with descriptive analysis techniques. This research resulted in the finding that the cash expenditure accounting system in Dinas X Bojonegoro Regency already has a clear system and procedures with adequate supporting documents and books or records, even though there are obstacles to the absence of an internal control system.

Keywords: Cash, Cash Expenditures, Accounting System.

PENDAHULUAN

Entitas merupakan suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi yang berbadan hukum dan menjalankan kegiatan finansial (Safitri, 2021). Dalam pelaksanaan kegiatannya, entitas memiliki fokus tujuan untuk menjaga kelangsungan usaha dan menjaga hubungan baik dengan investor dengan memberikan informasi keuangan guna memaksimalkan laba (Irfan, 2022). Berdasarkan hal tersebut, keberadaan laporan keuangan diperlukan sebagai media penyajian informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, ataupun perubahan posisi keuangan suatu perusahaan sehingga dapat dijadikan dasar penentuan keputusan ekonomi bagi sebagian besar pengguna (Darminto, 2019). Darminto (2019), juga menyebutkan bahwa laporan keuangan yang umum dibuat oleh suatu entitas terdiri atas dua jenis, yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwasannya setiap entitas pelaporan berkewajiban untuk melaksanakan akuntansi dan menyusun serta menyampaikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban. Entitas pelaporan dalam PP No. 8 Tahun 2006 terdiri atas, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara atau lembaga, dan bendahara umum negara. Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang semua pelaksanaan kegiatannya berada dibawah pengawasan pemerintah daerah juga wajib menyampaikan laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dana atau modal yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan (Setyawati, 2021). Untuk dapat dikatakan baik, laporan keuangan BUMD harus memenuhi kriteria kualitatif pelaporan keuangan yaitu dapat dipahami secara umum, relevan, kredibel atau andal, serta dapat dibandingkan dengan lainnya (Irawati et. al. (2019).

Jika dibandingkan dengan sektor swasta, laporan keuangan BUMD yang merupakan sektor publik berbeda dalam hal komponen penyusunnya. Pada sektor swasta, laporan keuangannya terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan laba ditahan, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Semua komponen laporan keuangan sektor swasta disebut sebagai laporan keuangan, sedangkan pada sektor publik atau pemerintahan, penyebutannya terbagi atas laporan pelaksanaan atau realisasi anggaran dan laporan keuangan (Rahayu, 2019). Adapun komponen laporan keuangan sektor publik dalam Permendagri No. 64 Tahun 2013 mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain memiliki komponen yang berbeda, sasaran pertanggungjawaban kedua sektor tersebut juga berbeda. Pada sektor publik sasaran pertanggungjawaban ditujukan kepada pihak legislatif dan masyarakat, sedangkan pada sektor swasta ditujukan kepada para investor atau kreditur (Nulhakim & Nurhayati, 2020).

Komponen laporan pelaksanaan anggaran pada pemerintah daerah yang berbeda dengan sektor swasta ini erat kaitannya dengan sasaran pertanggungjawabannya yaitu pihak legislatif dan masyarakat. Tujuan disusunnya anggaran adalah salah satunya guna mendanai belanja rutin pegawai dan kegiatan publik yang ditargetkan untuk kesejahteraan masyarakat (Dendeng et al., 2020). Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan anggaran yang efektif dan efisien untuk mengelola sumber daya daerah yang ada guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, penggunaan anggaran harus diselaraskan dengan jumlah kas serta target yang ditetapkan, sehingga pengeluaran kas perlu diperhatikan sedemikian rupa untuk menghindari kesalahan ataupun penyalahgunaan. Lemah dan tidak efektifnya pengeluaran kas suatu perusahaan seringkali menyebabkan kerugian (Listya et al., 2022).

Pengeluaran kas adalah transaksi yang paling sering terjadi dalam suatu perusahaan, dimana perusahaan mengeluarkan dana tertentu untuk membiayai pemeliharaan, beban gaji atau upah pegawai, dan pengeluaran lainnya (Suryati, 2018). Pengeluaran kas tentunya memiliki sistem dan prosedur tertentu dalam pelaksanaannya. Sistem merupakan suatu jaringan yang disusun berdasarkan pola terpadu untuk melakukan kegiatan tertentu dalam organisasi, sedangkan prosedur adalah uraian kegiatan yang ditujukan untuk mengatur jalannya suatu kegiatan organisasi yang berulang dimana pelaksanaannya seringkali melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih (Agustin et al., 2020). Sistem pengeluaran kas sendiri merupakan salah satu sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah yang di dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa prosedur akuntansi yang diterapkan di lingkungan pemerintahan daerah terdiri atas prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset.

Dinas X Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

wilayah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri telah meraih 8 kali berturut-turut opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, 2022). Mempertahankan opini WTP merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai salah satu unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro, tentunya Dinas X juga bertanggung jawab untuk mengelola keuangannya sedemikian rupa untuk dapat merealisasikan anggaran yang telah disusun sebaik mungkin. Pelaksanaan realisasi anggaran yang baik, tidak lepas dari aktivitas pengeluaran kas. Di Dinas X Kabupaten Bojonegoro pengeluaran kas dilakukan oleh seorang bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran tersebut memiliki tugas untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dana kas yang telah dianggarkan dengan sebaik-baiknya sehingga realisasi anggaran dapat efektif dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas yang memadai diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan tentunya memaksimalkan pengeluaran kas yang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan dan evaluasi terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas pada Dinas X Kabupaten Bojonegoro untuk melihat bagaimana kas dikeluarkan untuk berbagai kepentingan, mengingat betapa pentingnya kas dalam menunjang kelancaran operasional suatu entitas.

Dengan latar belakang tersebut, perlu dan menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait permasalahan sistem akuntansi pengeluaran kas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro dengan judul, **“Optimalisasi Sistem Pengeluaran Kas Pada Dinas X Di Kab Bojonegoro: Studi Kasus Hasil Pembelajaran Lapangan”**. Penelitian ini penting agar sistem pengelolaan pengeluaran kas di Dinas X semakin baik. Dengan demikian kualitas laporan keuangan Dinas X selaku salah satu unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro SKPD Jawa Timur juga semakin meningkat, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian Dapat terus dipertahankan.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Akuntansi

Sistem merupakan berbagai komponen yang dikoordinasikan menjadi satu guna menyelesaikan suatu tujuan sehingga dapat mempermudah pengguna dan pemakainya (Agustin et al., 2020). Mulyadi (2018), mendefinisikan sistem secara umum sebagai sekelompok unsur yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain, yang secara keseluruhan memiliki fungsi untuk mewujudkan tujuan tertentu. Adapun sistem akuntansi oleh Mulyadi dijelaskan lebih lanjut sebagai kelompok formulir, catatan ataupun laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa agar dapat memberikan berbagai informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam mempermudah pengelolaan suatu perusahaan. Sistem akuntansi adalah prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelompokkan, meringkas, dan melaporkan informasi baik operasi ataupun keuangan dari suatu perusahaan (Manurung, 2021). Dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat 3 dijelaskan bahwa sistem akuntansi dalam pemerintah daerah merupakan serangkaian proses yang dimulai dengan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengelompokan, hingga pelaporan keuangan suatu daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas APBD baik secara manual maupun terkomputerisasi.

Kas

Kas merupakan aset yang paling liquid yang tidak hanya terbatas pada bentuk uang tunai saja, melainkan juga dapat berbentuk cek, wesel ataupun surat berharga yang dapat

dipakai sebagai alat untuk melakukan pembayaran dengan segera (Suryati, 2018). Kas ialah alat pembayaran yang bebas serta sedia untuk dipakai dalam membiayai aktivitas suatu entitas (Manurung, 2021). Kas diakui sama besarnya dengan nilai nominal atau nilai yang tercantum dalam uang tunai atau bentuk lain yang dapat disamakan dengannya. Dalam suatu perusahaan, kas dipergunakan untuk mendanai seluruh kegiatan operasional harian dan mengadakan investasi baru (Gani, 2021).

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Pengeluaran kas merupakan transaksi yang seringkali dilakukan dalam suatu perusahaan, dimana dana tertentu dikeluarkan misalnya untuk membiayai upah atau gaji pegawai, biaya pemeliharaan, serta pengeluaran-pengeluaran lainnya. Pengeluaran kas merupakan serangkaian transaksi yang berdampak pada berkurangnya saldo kas atau bank yang dimiliki suatu perusahaan akibat adanya aktivitas pembelian tunai, pembayaran kewajiban, atau aktivitas lain yang dapat mengurangi kas (Suryati, 2018). Pengeluaran kas dalam suatu perusahaan memiliki dua cara pelaksanaan, yaitu dapat menggunakan cek atau menggunakan dana kas kecil untuk pengeluaran dengan jumlah yang relatif kecil (Mulyadi, 2018). Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan serangkaian tahapan, baik secara manual ataupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan hingga pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas APBD yang digunakan berkaitan dengan pengeluaran kas suatu SKPD (Meilisa et al., 2019).

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan digunakan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini. Prinsip utama teori keagenan adalah adanya hubungan antara dua pihak yaitu pihak yang memberi wewenang dan yang menerima wewenang atau agen (Sulistiyoratih & Riharjo, 2019). Pada pelaporan keuangan daerah, pemerintah bertindak sebagai agen yang bertugas untuk mengelola keuangan dan memberikan pelayanan publik yang layak kepada masyarakat selaku *principal* (Sarnani & Dewi, 2022). Berdasarkan teori keagenan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kejelasan akan anggaran yang jelas dan spesifik kepada masyarakat (Alimuddin, 2022). Dengan demikian, pemerintah wajib menyajikan laporan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang wajar dan terbebas dari salah saji material.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif yang ditujukan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang ada yaitu berkaitan dengan sistem dan prosedur pengeluaran kas sesuai dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Dinas X Kabupaten Bojonegoro dengan waktu penelitian sesuai periode pelaksanaan pembelajaran lapangan yaitu 13 Juni 2022 hingga 5 Agustus 2022 dengan detail kegiatan sebagai berikut:

Keterangan	Minggu Ke-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Perkenalan	■							
Penugasan		■	■	■	■	■	■	
Konsultasi topik				■	■	■		
Pengambilan data				■	■	■		

Penyusunan laporan								
Pamitan								

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui proses wawancara dan observasi yang dilaksanakan secara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder berupa data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen dan website resmi instansi.

Data yang dibutuhkan, dikumpulkan dengan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi dilakukan melalui proses mengamati dan meninjau secara langsung di lokasi penelitian selama proses pembelajaran lapangan berlangsung untuk mendapatkan fakta mengenai pelaksanaan proses pengeluaran kas yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara dilaksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada bendahara pengeluaran kas dan juga kepala sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan di Dinas X Kabupaten Bojonegoro. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai hal yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi ataupun data yang dibutuhkan melalui situs internet, website resmi instansi, jurnal, arsip dokumen ataupun peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan pengeluaran kas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan secara umum, data display atau menggambarkan data dalam bentuk bagan, dan menarik kesimpulan. Proses analisis data dilakukan sebelum pelaksanaan pembelajaran lapangan, selama proses pembelajaran lapangan, dan sesudah pembelajaran di lapangan selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Selama melaksanakan pembelajaran lapangan, praktikan diberikan kesempatan untuk membantu tugas-tugas dari Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan. Pada hari pertama pelaksanaan pembelajaran lapangan, praktikan melakukan perkenalan dengan lingkungan kantor Dinas X Kabupaten Bojonegoro dan diarahkan ke tempat kerja praktikan. Adapun tugas-tugas utama yang dikerjakan oleh praktikan selama melaksanakan kegiatan pembelajaran lapangan adalah Penginputan data Penilaian Prestasi Kerja PNS, Pembuatan Laporan Kinerja Pegawai, dan Perekapan Bukti Transaksi Pengeluaran Kas. Selain tiga tugas utama di atas, praktikan juga membantu melakukan pekerjaan lain yang ditugaskan baik oleh pembimbing lapangan selaku Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan maupun oleh staff Dinas X Kabupaten Bojonegoro lainnya.

Pembahasan

Sistem akuntansi pengeluaran kas ialah sistem yang dipakai untuk merekap berbagai transaksi terkait pengeluaran kas. Pengertian pengeluaran kas sendiri merupakan rangkaian kegiatan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penyetoran dan pelaporan pengeluaran uang dalam suatu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pengeluaran kas dalam sistem akuntansi

pemerintahan daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dengan menggunakan dokumen-dokumen atau catatan pendukung lainnya guna memperlancar proses pengeluaran kas. Adapun pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro selaku unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Sistem Akuntansi Pengeluaran kas Dinas X Kabupaten Bojonegoro

Sistem akuntansi pengeluaran kas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro terdiri atas serangkaian proses manual maupun komputerisasi yang dimulai dari proses pencatatan, klasifikasi, hingga pelaporan sebagai wujud pertanggungjawaban atas APBD. Pada Dinas X Kabupaten Bojonegoro pelaksanaan pengeluaran kas dilakukan secara langsung oleh seorang bendahara pengeluaran dalam pengawasan Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan. Menurut penuturan bendahara pengeluaran, basis yang digunakan dalam pencatatan pengeluaran kas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro adalah basis kas, namun dalam beberapa transaksi juga menggunakan basis akrual.

“Pakai basis kas mba, tapi basis akrual juga dipakai dalam beberapa transaksi. Lebih seringnya pakai basis kas” ~ Bendahara pengeluaran.

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (12), basis pengeluaran kas Dinas X Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam basis kas menuju akrual. Basis kas menuju akrual merupakan basis yang mengakui transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas sedangkan asset, utang dan ekuitas diakui menggunakan basis akrual.

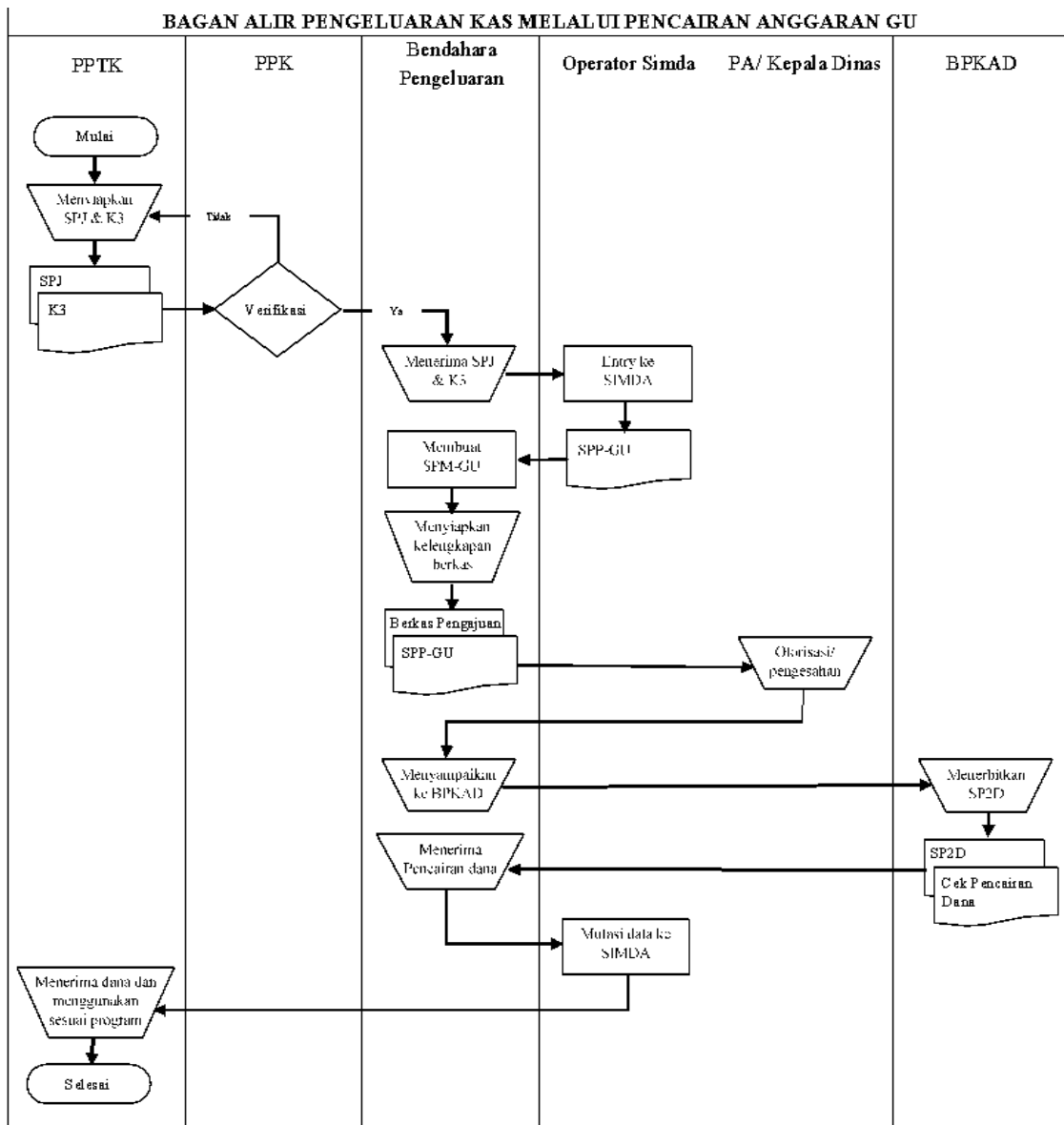
Secara umum pengeluaran kas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan dengan dua cara yaitu secara tunai dengan kas kecil dan secara transfer atau menggunakan cek. Jenis pengeluaran kas atau pencairan dana di Dinas X Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi tiga jenis yaitu Pengeluaran kas melalui pencairan anggaran ganti uang (GU), Langsung (LS), dan Uang Persediaan (UP). Adapun prosedur pengeluaran kas atau pencairan anggaran untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut:

1) Prosedur Pencairan Anggaran Ganti Uang (GU)

Ganti uang adalah uang yang digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah digunakan. Prosedur pencairan anggaran ganti uang di Dinas X Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a. PPTK menyiapkan SPJ sebagai bukti bahwa program kegiatan telah dilaksanakan dan kartu kendali kegiatan (K3), seperti: nota, kuitansi, pajak, dll
- b. SPJ yang telah disiapkan kemudian diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan DPA, apabila masih ada kekurangan maka dikembalikan ke PPTK untuk dilengkapi
- c. SPJ program kegiatan yang telah diverifikasi dan lengkap diterima oleh bendahara pengeluaran
- d. Operator SIMDA mengentry data pada aplikasi SIMDA untuk pembuatan SPP-GU
- e. Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPM-GU
- f. Bendahara Pengeluaran menyiapkan berkas untuk pengajuan sebagai berikut:
 - Surat pengajuan SPP-GU
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab dari PA

- SPM yang diterbitkan oleh PPK, dan
- SPJ yang telah disahkan
- g. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melakukan otorisasi atau tanda tangan pengesahan dokumen pengajuan SPP-GU
- h. Seluruh kelengkapan berkas untuk pengajuan SPP-GU disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) oleh Bendahara Pengeluaran
- i. BPKAD menerima data dan berkas pengajuan SPP yang dilanjutkan dengan menerbitkan SP2D
- j. Bendahara Pengeluaran mengambil uang yang dicairkan di BUD dengan dilengkapi SP2D dan cek pencairan
- k. Operator SIMDA memutasi data SP2D yang diterima bendahara pengeluaran pada SIMDA sehingga data keuangannya akan terupdate
- l. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima dana untuk dapat digunakan sesuai program yang telah ditetapkan.



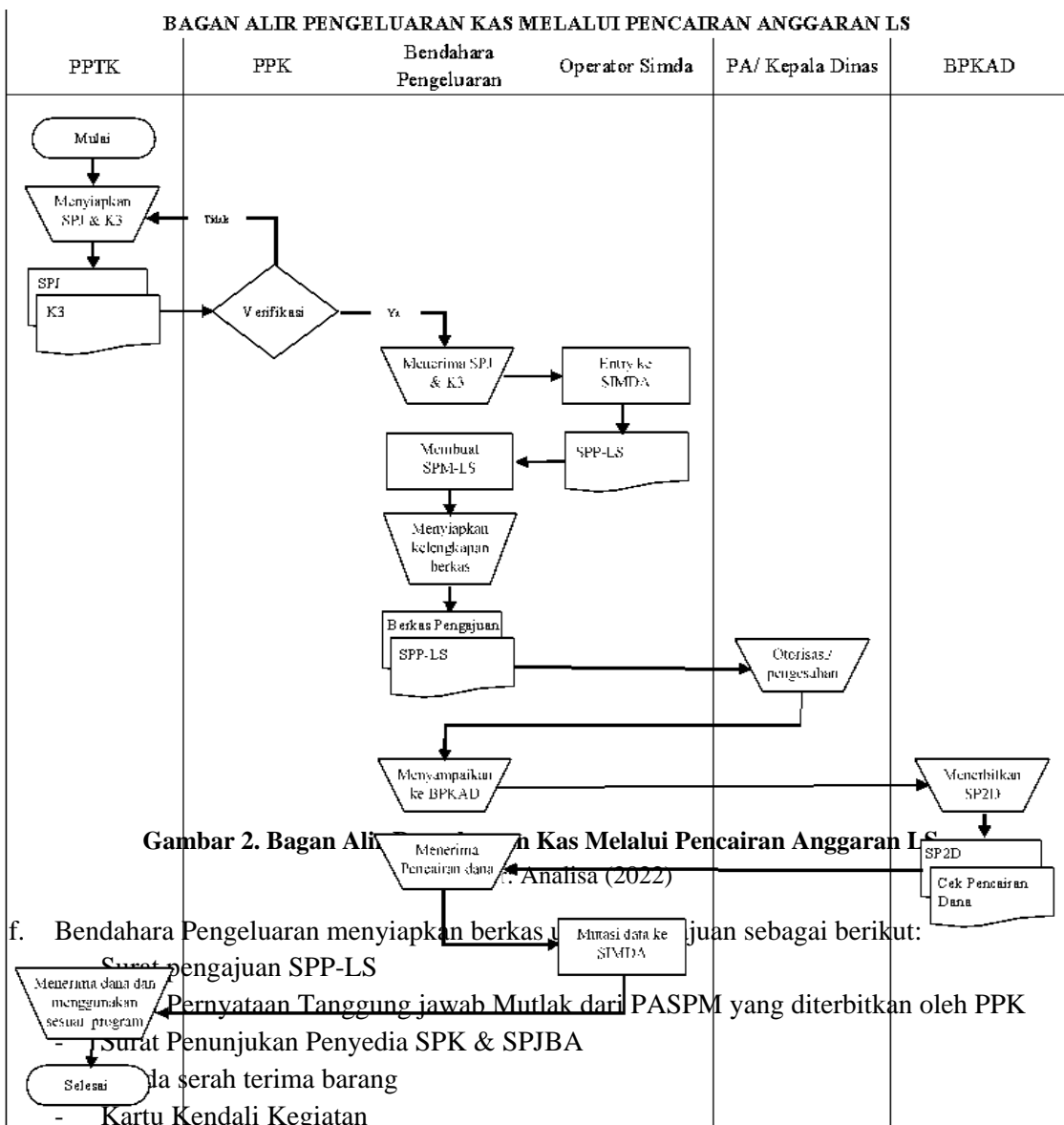
Gambar 1. Bagan Alir Pengeluaran Kas Melalui Pencairan Anggaran GU

Sumber: Analisa (2022)

2) Prosedur Pencairan Anggaran Langsung (LS)

Anggaran langsung merupakan penggunaan uang persediaan untuk aktivitas pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. Adapun prosedur pencairan anggaran langsung di Dinas X Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

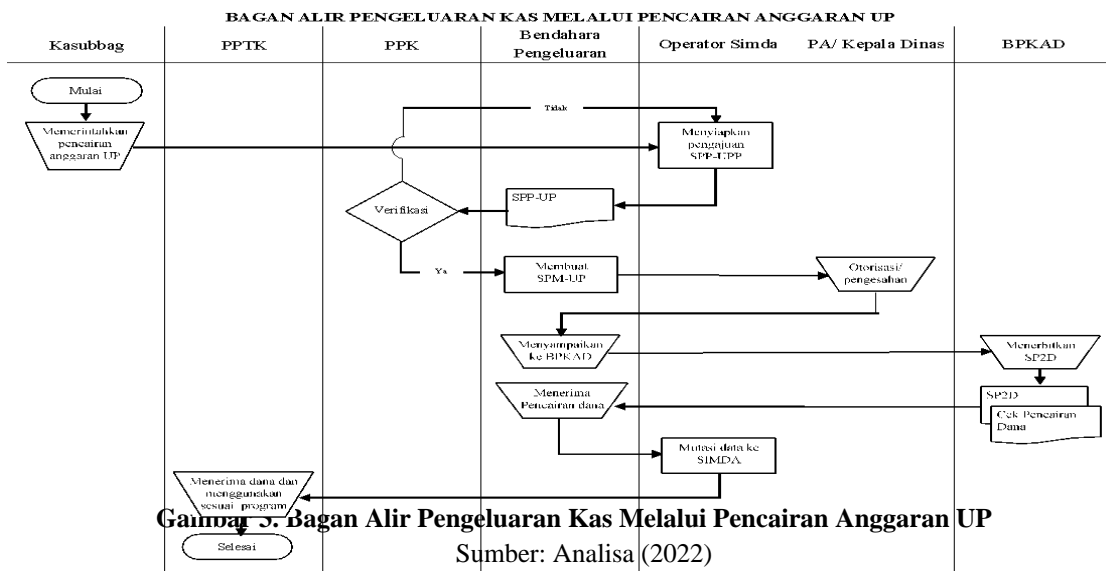
- a. PPTK menyiapkan SPJ sebagai bukti bahwa program kegiatan telah dilaksanakan dan K3, seperti: Dokumen pengadaan, Kontrak, nota, kuitansi, pajak, dll
- b. SPJ yang telah disiapkan kemudian diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan DPA, apabila SPJ ada yang kurang, maka kembali ke PPTK
- c. SPJ program kegiatan yang telah diverifikasi dan lengkap diterima oleh bendahara pengeluaran
- d. Operator SIMDA melakukan entry data pada SIMDA untuk pembuatan SPP-LS
- e. Bendahara Pengeluaran membuat SPM-LS



- g. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melakukan otorisasi atau tanda tangan pengesahan dokumen pengajuan SPP-LS
- m. Seluruh kelengkapan berkas untuk pengajuan SPP-LS disampaikan ke BPKAD oleh Bendahara Pengeluaran
- h. BPKAD menerima data dan pengajuan SPP yang dilanjutkan dengan menerbitkan SP2D
- i. Bendahara Pengeluaran mendapatkan tembusan SP2D
- n. Operator SIMDA memutasi data SP2D yang diterima bendahara pengeluaran pada SIMDA sehingga data keuangannya akan terupdate
- j. Rekanan menerima pencairan anggaran dari BUD sesuai dengan program kegiatan yang dikerjakan

3) Prosedur Pencairan Anggaran Uang Persediaan (UP)

Uang persediaan adalah uang yang digunakan untuk mengisi kas dari setiap SKPD yang pengisian saldonya dilakukan sekali dalam setahun. Berikut merupakan prosedur pencairan anggaran uang persediaan:



- a. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mencairkan anggaran UP sesuai SK Bupati, dimana besaran Pengajuan UP adalah senilai Belanja Langsung dikurangi Belanja Modal Anggaran LS dan dibagi 12
- b. Operator SIMDA menyiapkan pengajuan SPP-UP
- c. Berkas pencairan anggaran diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan DPA
- d. Bendahara Pengeluaran membuat SPM-UP
- e. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melakukan otorisasi atau tanda tangan pengesahan berkas pencairan UP
- f. Seluruh kelengkapan berkas pengajuan SPP disampaikan ke BPKAD oleh Bendahara Pengeluaran
- g. BPKAD menerima berkas pengajuan pencairan anggaran disertai penerbitan SP2D
- h. Bendahara Pengeluaran menerima uang yang dicairkan di BUD dengan dilengkapi SP2D dan cek pencairan
- i. Operator SIMDA memutasi data SP2D yang diterima bendahara pengeluaran pada SIMDA sehingga data keuangannya akan terupdate

- j. PTTK mendapatkan dana dan dapat menggunakan sesuai program dan kegiatan yang ditetapkan atau diajukan

Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas pada Dinas X Kabupaten Bojonegoro, terdiri atas :

- 1) Surat Penyediaan Dana (SPD), adalah surat yang dibuat sebagai media penyampaian oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang menandakan tersedianya dana untuk diserap atau dicairkan.
- 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), adalah surat yang dibuat atau diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas X Kabupaten Bojonegoro guna permintaan pembayaran.
- 3) Surat Perintah Membayar (SPM), adalah surat yang terbitkan Pengguna Anggaran (PA) yaitu jika di Dinas X Kabupaten Bojonegoro merupakan Kepala Dinas dalam rangka pengajuan SP2D yang nantinya diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), adalah surat yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk mencairkan uang di bank yang telah dijadikan mitra.
- 5) Kwitansi Pembayaran dan Bukti Penerimaan Lainnya, sebagai tanda atau bukti pelaksanaan pembayaran yang dilakukan.
- 6) Bukti Transfer, yang merupakan dokumen atau bukti atas pembayaran pengeluaran daerah yang dilakukan secara transfer.

Catatan/Buku Pendukung Lain yang Digunakan

Catatan atau buku pendukung yang digunakan pada prosedur akuntansi pengeluaran kas pada Dinas X Kabupaten Bojonegoro, terdiri atas:

- 1) Bukti jurnal pengeluaran kas, adalah catatan yang dibuat bendahara pengeluaran untuk mencatat serta mengelompokkan setiap transaksi yang terjadi berkaitan dengan aktivitas pengeluaran kas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Buku besar, adalah buku yang berisi caatatan yang dibuat oleh bendahara pengeluaran untuk mencatat semua transaksi dari jurnal pengeluaran atas setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, serta pembiayaan.
- 3) Buku besar pembantu, dibuat dan digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk mencatat setiap transaksi dan kejadian yang memuat rincian atas akun-akun di buku besar serta sebagai alat untuk menguji silang lengkap atau tidaknya informasi atas akun tertentu jika dibutuhkan.

Kendala yang Dialami Bendahara Pengeluaran

Kendala yang dialami bendahara pengeluaran selaku pejabat fungsional yang melaksanakan pengeluaran kas menurut hasil wawancara sejauh ini tidak ada.

“Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti, karena saya dibantu oleh staff yang lebih muda dalam pelaksanaan tugas” ~ Bendahara pengeluaran.

Namun, dari pengamatan praktikan ketika staff muda yang bersangkutan tidak hadir atau izin, bendahara pengeluaran terlihat sedikit kesulitan dalam pelaksanaan tugas yang terkomputerisasi.

Dalam wawancara yang praktikan lakukan dengan bendahara pengeluaran, beliau juga menuturkan bahwa dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro tidak terdapat sistem pengendalian internal yang jelas. Dari hasil observasi selama pelaksanaan pembelajaran lapangan, beberapa kali pejabat Dinas X Kabupaten Bojonegoro

meminjam uang kepada bendahara pengeluaran untuk kepentingan pribadi dan hanya menggunakan asas saling percaya dari kedua belah pihak. Hal ini sangat disayangkan karena sistem pengendalian internal berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengeluaran kas instansi serta mengantisipasi terjadinya penyelewengan.

Selain itu selama praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan (pembelajaran lapangan), seringkali para staff mengeluhkan tentang terganggunya koneksi internet kantor sehingga pelaksanaan tugas menjadi terhambat. Tidak terkecuali staff bagian pengeluaran kas.

Solusi yang Dapat Penulis Berikan atas Permasalahan yang Ditemukan

Dalam pelaksanaan akuntansi pengeluaran kas baiknya Dinas X Kabupaten Bojonegoro menyusun prosedur-prosedur pengendalian yang tegas dan jelas untuk mengurangi resiko kesalahan dan kecurangan. Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*), unsur-unsur pengendalian internal terdiri atas lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Reding et al., 2015).

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian meliputi semua tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan pengendalian untuk menciptakan kesadaran bagi semua anggota organisasi. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui pembentukan prosedur tertulis terutama untuk bidang yang berkaitan dengan akuntansi. Selain itu, mempekerjakan karyawan yang sesuai dengan klasifikasi pendidikan dan kemampuan juga dapat mendukung terciptanya lingkungan pengendalian sistem pengeluaran kas.

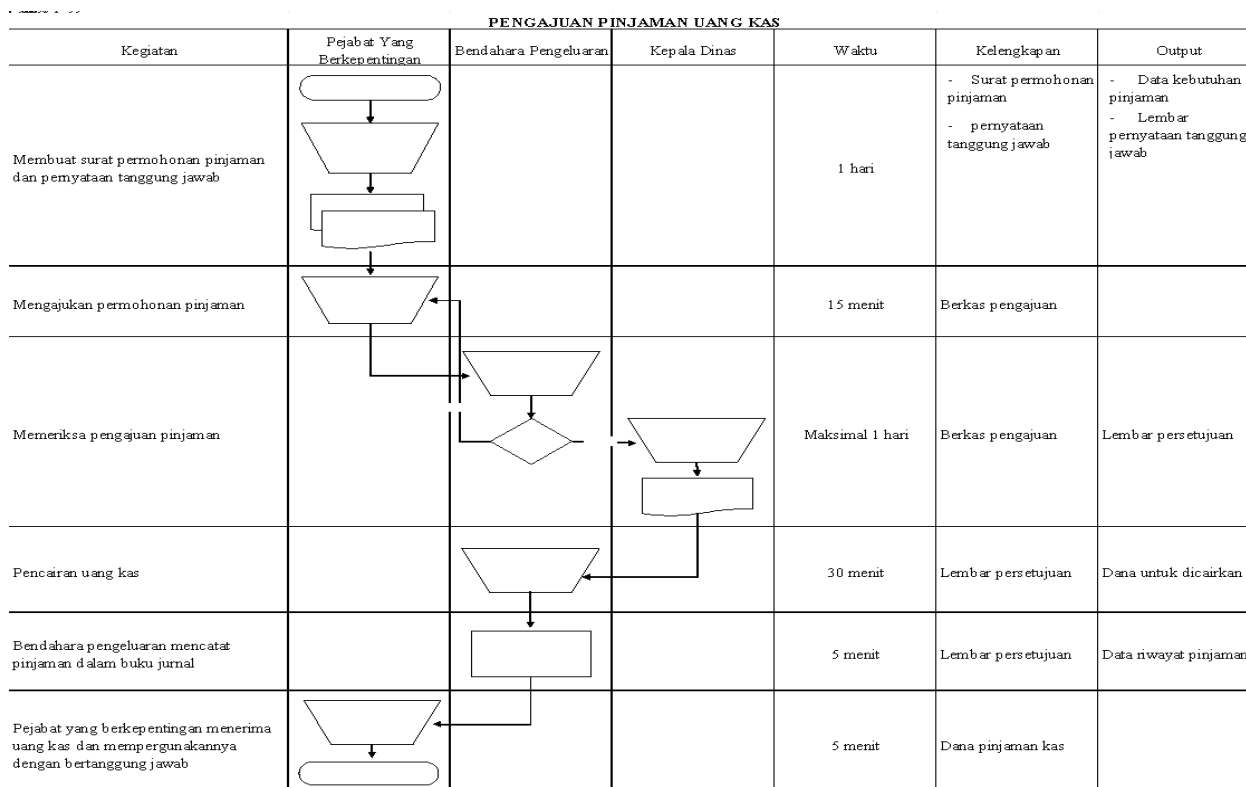
b. Penaksiran risiko

Pengeluaran kas merupakan kegiatan yang beresiko tinggi terjadi kecurangan dalam hal jumlah uang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau dilaporkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penaksiran terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas pengeluaran kas beserta cara menanggulangnya.

c. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian dalam pengeluaran kas dapat diwujudkan misalnya melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- Memberikan nomor urut pada setiap dokumen untuk menghindari pencatatan berulang atau pemalsuan untuk kepentingan yang tidak bertanggungjawab.
- Melakukan pemisahan tugas antara pegawai bagian pencatatan dengan bagian pengeluaran kas untuk mencegah pegawai tersebut melakukan kecurangan.
- Penilaian independen atas kinerja pegawai bagian pengeluaran kas diperlukan karena pada umumnya pemeriksaan yang dilaksanakan oleh orang lain yang tidak berhubungan atas jalannya operasi suatu kegiatan akan lebih efektif.
- Otoritas yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi pengeluaran kas yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam hal ini, otorisasi seringkali diwujudkan dalam bentuk penandatanganan atas dokumen oleh pejabat yang berwenang. Misalnya dari contoh kendala yang ada yaitu adanya aktivitas peminjaman uang kas hanya dengan asas saling percaya, otorisasi diperlukan untuk menjamin keamanan uang yang dipinjamkan. Berikut praktikan menyarankan SOP Peminjaman uang kas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro pada Gambar 4.



Gambar 4. SOP Pengajuan Pinjaman yang Disarankan
Sumber: Analisa (2022)

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi erat kaitannya dengan penyampaian laporan atau bukti pengeluaran kas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas uang yang telah dikeluarkan.

e. Pemantauan

Pemantauan atau pengawasan langsung dari internal auditor atau atasan dari pihak yang bersangkutan dapat berperan penting dalam menilai kualitas pengendalian internal dan aktivitas pengeluaran kas yang dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terkait sistem akuntansi pengeluaran kas pada Dinas X Kabupaten Bojonegoro, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Sistem akuntansi pengeluaran kas pada Dinas X Kabupaten Bojonegoro menggunakan basis kas menuju akrual dengan sistem dan prosedur yang jelas dan terbagi sesuai dengan jenis pengeluaran kasnya yaitu pengeluaran kas melalui pencairan anggaran ganti uang (GU), Langsung (LS), dan Uang Persediaan (UP).
- 2) Dokumen yang digunakan dalam pelaksanaan akuntansi pengeluaran kas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro antara lain, SPD, SPP, SPM, kwitansi pembayaran dan bukti penerimaan lainnya, SP2D, serta bukti transfer.
- 3) Adapun catatan atau buku pendukung lainnya dalam sistem akuntansi pengeluaran kas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro antara lain, bukti jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu.
- 4) Sejauh ini tidak ada kendala berarti yang dialami oleh bendahara pengeluaran kas, namun diketahui ternyata tidak terdapat sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro.

- 5) Pengeluaran kas merupakan kegiatan yang beresiko tinggi terjadi kecurangan, sehingga diperlukan pengadaan prosedur-prosedur pengendalian internal yang tegas dan jelas di Dinas X Kabupaten Bojonegoro.

Adapun saran dari penulis selaku penulis yang menjalankan Program Praktik Kerja Lapangan (pembelajaran lapangan) yang mungkin berguna bagi instansi antara lain sebagai berikut:

- 1) Dinas X Kabupaten Bojonegoro harus mempertahankan dan menjaga sistem kerja yang telah dibangun sehingga mampu menimbulkan kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan. Selain itu, diharapkan Dinas X untuk melakukan peningkatan dalam hal perbaikan kualitas SDM yang kompeten, kualitas akses internet dan teknologi, serta perlu adanya sistem pengendalian internal yang jelas dan tegas dalam pengeluaran kas Dinas X Kabupaten Bojonegoro untuk mencegah kesalahan dan kecurangan yang mungkin terjadi.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan wawancara yang lebih mendalam sehingga dapat mendapatkan informasi yang lebih memadai. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian kuantitatif dengan membandingkan kualitas sistem akuntansi pengeluaran kas di instansi-instansi yang termasuk dalam unsur pelaksana urusan pemerintah kabupaten bojonegoro.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R., Irwan, M., & Andriani, R. (2020). Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *JURNAL EKONOMI AL-KHITMAH* 2.2, 33–50.
- Alimuddin, I. (2022). Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Luwu. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 135–145. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.325>
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (2022). *Pemkab Bojonegoro Kembali Raih WTP BPK 8 Kali*. <https://jatim.bpk.go.id/dari-media/pemkab-bojonegoro-kembali-raih-wtp-bpk-8-kali/#>
- Darminto, D. P. (2019). *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dendeng, W. F., Elim, I., & Wokas, H. R. N. (2020). EVALUASI PROSEDUR PENGELUARAN KAS DENGAN MENGGUNAKAN UANG PERSEDIAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 48–54. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/27850/27338>
- Gani, A. Y. A. (2021). Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas di PT. HASjrat Abadi Cabang Kendari. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 3(2), 103–112. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v3i2.120>
- Gusnawan, I. (2019). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas pada PT. Radja Angkut Indonesia Tanjung Morawa* (Doctoral dissertation).
- Irawati, Salju, & Hapid. (2019). Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pt. Telkom Kota Palopo. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 3(2).
- Irfan, A. (2022). SUATU KAJIAN KONSEPTUAL: UPAYA ISLAMISASI AKUNTANSI SEBAGAI JALAN MENUJU ILLAHI. *Jurnal Al-Iqtishad*, 1(18), 84–98.

- Khosakiyah, E., Meiriasari, V., & Putri, A. U. (2020). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Kantor Wilayah*. 1(1), 11–22.
- Listra, V., Sudirman, & Nurhani. (2020). PENGGUNAAN STANDAR PEGAWAI DALAM MENENTUKAN KINERJA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI MAKASSAR. *MACAKKA Journal*, 1(4), 70–79.
- Listya, K., Liniarti, S., Surya, R., Nasution, A., Medan, K., & Johor, M. (2022). Internal Control System Of Cash Receiving And Cash Expenditure In Bimbingan Belajar Primagama Tanjung morawa. *Jurnal Mantik*, 5(4), 2617–2627.
- Manurung, M. (2021). *Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan*.
- Meilisa, T. A., Sondakh, J. J., & Tinangon, J. J. (2019). Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 433–439. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26361.2019>
- Nulhakim, L., & Nurhayati, N. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Bagi Perangkat Desa. *Jurnal Bhakti Negeri*, 1(1), 15–20. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/dedikasikomunitas/article/view/3107>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
- Rahayu, R. (2019). *Penyusunan Laporan Keuangan Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman*. Universitas Islam Indonesia.
- Reding, K. F., Sobel, P. J., Anderson, U. L., Ramamoorti, S., Salamasick, M., & Riddle, C. (2015). Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, Third Edition. In *The IIA Research Foundation*.
- Safitri, S. A. A. (2021). *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Dagang Dimas Swalayan TA 2018* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Sarnani, E., & Dewi, R. S. (2022). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kabupaten Simeulue. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 926–934.
- Setyawati, R. A. (2021). *Laporan Akhir Studi Magang PT Anidya Mitra Internasional Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

- Sulistiyoratih, E., & Riharjo, I. B. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6), 1–18.
- Surat Edaran Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah Nomor SE.900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengeluaran Keuangan Daerah
- Suryati, E. (2018). Sistem Pengeluaran Kas Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 12(80), 42–49.
<https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/642/575>